

# Evaluasi Ketersediaan Prasarana Permukiman Di Kelurahan Wulung

T. E. Maharani<sup>1</sup>, D. Suwandono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Diponegoro, Indonesia

## Article Info:

Received: 05 April 2022

Accepted: 06 April 2022

Available Online: 30 November 2022

## Keywords:

Evaluation; settlement infrastructure, community perception, Indonesian National Standards (SNI)

## Corresponding Author:

Tifa Eri Maharani  
Diponegoro University,  
Semarang, Indonesia  
Email: [tifaeri12@gmail.com](mailto:tifaeri12@gmail.com)

**Abstract:** An increase in the number of residents affects the increase in community activities. The increase in community activities needs to be balanced with the provision of adequate supporting infrastructure referring to SNI 03-1733-2004. As a center of local activities in Randublatung District, wulung village is equipped with quite complete infrastructure. The goal to be achieved in this study is to evaluate the availability of settlement infrastructure in Wulung Village based on SNI and community perception. This research uses quantitative methods with quantitative and comparative descriptive analysis. Quantitative descriptive analysis is used to identify the results of surveys on the availability and condition of infrastructure in the field as well as the results of questionnaires. Comparative descriptive analysis is used to compare the findings with SNI and people's perceptions. The results obtained in this study are the availability of settlement infrastructure in Wulung Village has met the standards with good conditions, problems occur in drainage networks that have been clogged due to wild plants and garbage, and in waste networks that are still found garbage on roadsides and river banks due to lack of service coverage.

Copyright © 2016 JTPWK-UNDIP

This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.

## How to cite (APA 6th Style):

Maharani, T. E., & Suwandono, D. (2022). Evaluasi Ketersediaan Prasarana Permukiman Di Kelurahan Wulung. *Jurnal Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Dan Kota)*, 11(5), 306–315. DOI: [10.14710/tpwk.2022.33676](https://doi.org/10.14710/tpwk.2022.33676)

## 1. PENDAHULUAN

Kebutuhan dasar manusia semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kompleksitas aktivitasnya dalam bermasyarakat (Tahir, 2019). Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan bertempat tinggal, aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, aktivitas kesehatan, serta aktivitas pelayanan umum yang berupa sarana dan prasarana dan harus dipenuhi (Adimagistra & Pigawati, 2016). Sarana dan prasarana memiliki peranan penting dalam menunjang aktivitas masyarakat serta pengembangan ekonomi, sosial dan budaya yang berupa fasilitas fisik. Seiring bertambahnya jumlah penduduk akan berpengaruh pada peningkatan permukiman dan aktivitas masyarakat didalamnya. Tentunya perubahan yang terjadi perlu diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai.

Prasarana lingkungan merupakan komponen utama dalam suatu kawasan permukiman yang terdiri dari jaringan jalan, jaringan drainase, saluran air hujan, dan tempat pembuangan sampah yang kesemuanya sangat menentukan kualitas permukiman yang dibangun (Sinulingga, 1999). Standar Pelayanan Minimal digunakan guna mendukung penyediaan permukiman, pangan, aksesibilitas dan peruntukan ruang dalam pembangunan suatu wilayah yang wajib dilaksanakan oleh wilayah itu sendiri (Puspita & Suwandono, 2014). Penelitian ini mengacu pada peraturan SNI 03-7013-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Adapun ketentuan dalam penyediaan prasarana permukiman pada suatu wilayah dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1.** Ketentuan Penyediaan Prasarana Permukiman. (SNI 03-7013-2004)

No	Prasarana	Ketentuan	Sumber
1	Jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan kolektor, lebar jalan 7 m</li> <li>- Jalan lokal, lebar jalan 3-6 m</li> <li>- Jalan lingkungan, lebar jalan m</li> <li>- Menggunakan perkerasan beton/aspal/<i>paving block</i></li> </ul>	SNI 03-7013-2004
2	Drainase	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki drainase/selokan</li> <li>- Mampu menampung air</li> <li>- Tidak ada genangan, apabila terdapat genangan tingginya &lt;30 cm dan lama genangan &lt;2 jam</li> <li>- Dilengkapi bangunan pelengkap: gorong-gorong, jembatan, pompa dan pintu air</li> </ul>	SNI 03-7013-2004
3	Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia bak sampah terbuat dari bahan kedap air dan bau serta tidak mudah berkarat</li> <li>- Dilengkapi gerobak sampah</li> <li>- Dilengkapi dengan tempat pembuangan sementara (TPS) yang lokasinya terpisah dengan permukiman</li> <li>- Jarak TPS dengan lingkungan hunian minimal 0 m</li> <li>- Dilengkapi dengan truk pengangkut sampah yang dapat menjangkau TPS menuju TPA</li> </ul>	SNI 03-7013-2004

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blora, Kelurahan Wulung termasuk dalam salah satu desa wisata dan sebagai pusat kegiatan lokal di Kecamatan Randublatung. Kelurahan Wulung merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dengan kelengkapan prasarana yang cukup lengkap. Prasarana utama yang menjadi pendukung kawasan permukiman terdiri dari prasarana jalan, drainase dan persampahan. Kelengkapan prasarana tersebut hanya tersedia di Kelurahan Wulung dari 18 desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Randublatung. Pada penelitian ini akan membahas mengenai prasarana permukiman di Kelurahan Wulung yang terdiri dari jaringan jalan, jaringan drainase, dan jaringan persampahan.

Sebagai salah satu pusat kegiatan lokal di Kecamatan Randublatung tentunya aktivitas dan mobilitas yang terjadi di Kelurahan Wulung terbilang tinggi. Namun, penyediaan prasarana dalam menunjang aktivitas masyarakat belum memadai, salah satunya dalam penyediaan prasarana jalan. Kondisi jalan lokal yang berada di RW 04 dan RW 05 mengalami kerusakan yang berupa terkikisnya perkerasan aspal dan berlubang di sepanjang jalan lokal. Kondisi tersebut dapat membahayakan para pengendara terlebih disaat musim penghujan karena jalan akan sangat licin. Mengacu pada program padat karya yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, perawatan jalan lingkungan menggunakan *paving block*. Program pemerintah yang menggalakan pavingisasi di jalan lingkungan belum sepenuhnya merata khususnya di RW 05 dan RW 06 karena masih terdapat ruas jalan dengan perkerasan tanah dan batu. Prasarana jalan merupakan aspek penting dalam kehidupan bermukim di desa maupun di kota sehingga kondisi dan pemerataannya perlu diperhatikan untuk menunjang mobilitas dan aksesibilitas masyarakatnya.

Kualitas lingkungan permukiman dapat ditentukan oleh optimalisasi fungsi prasarana lingkungannya. Penyediaan jaringan drainase hampir merata diseluruh kawasan permukiman di Kelurahan Wulung. Namun dalam praktiknya, drainase yang tersedia di RW 01 dan RW 02 tidak mampu menampung debit air saat musim penghujan, akibatnya terjadi banjir tahunan pada kawasan tersebut. Penyebab lain terjadinya banjir adalah kurangnya perawatan drainase sehingga terdapat sampah dan rumput liar yang dapat menghambat laju air.

Masalah persampahan dari tahun ke tahun masih menjadi masalah yang kompleks dan rumit sehingga pada akhirnya berdampak pada kualitas lingkungannya (Anggraini, 2014). Timbulan sampah pada suatu permukiman berasal dari rumah tangga, warung, bangunan umum, serta industri rumah tangga (Setiadi, 2015). Ketersediaan tempat pembuangan sampah (TPS) berada di RW 01 Dusun Pilangbangu. Meskipun telah disediakan tempat pembuangan sampah, lantas tidak membuat

masyarakat mengindahkahkan ketersediaan TPS tersebut. Hal ini dapat diketahui dari sepanjang jalan menuju tempat pembuangan sampah masih terdapat tumpukan sampah yang menggantung dan menimbulkan bau tidak sedap. Selain itu, peletakkan tempat pembuangan sampah tidak dapat dijangkau oleh seluruh RW yang ada di Kelurahan Wulung. Hal tersebut membuat masyarakat di RW yang lainnya memilih membakar sampahnya disekitar pekarangan rumah, namun tidak sedikit masyarakat yang tinggal di sekitar sungai memilih membuang sampah dipinggiran sungai.

Sehubungan dengan meningkatnya jumlah penduduk yang akan mempengaruhi aktivitas dan kebutuhan prasarana penunjang kegiatannya maka adanya penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi ketersediaan prasarana permukiman di Kelurahan Wulung yang berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga digunakan untuk mengkomparasikan ketersediaan prasarana di Kelurahan Wulung berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan persepsi masyarakat.

## 2. DATA DAN METODE

Lokasi penelitian berada di Kelurahan Wulung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode ini berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi tertentu, melakukan pengumpulan data dengan menggunakan instrumen penelitian, menggunakan analisis yang bersifat statistik serta tujuannya untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018). Teknik pengambilan data dilakukan dengan menggunakan teknik sampling dari keseluruhan populasi yang ada di Kelurahan Wulung. Pada penelitian ini yang akan dijadikan sampel adalah penduduk Kelurahan Wulung yang terdiri dari 6 RW. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, kuesioner dan studi pustaka. Jumlah populasi sampel masyarakat yang memahami secara keseluruhan sarana dan prasarana di Kelurahan Wulung tidak diketahui, sehingga pengambilan populasi sampel yang mengerti terkait kondisi sarana dan prasarana di Kelurahan Wulung dapat dihitung menggunakan rumus *lemeshow* sebagai berikut:

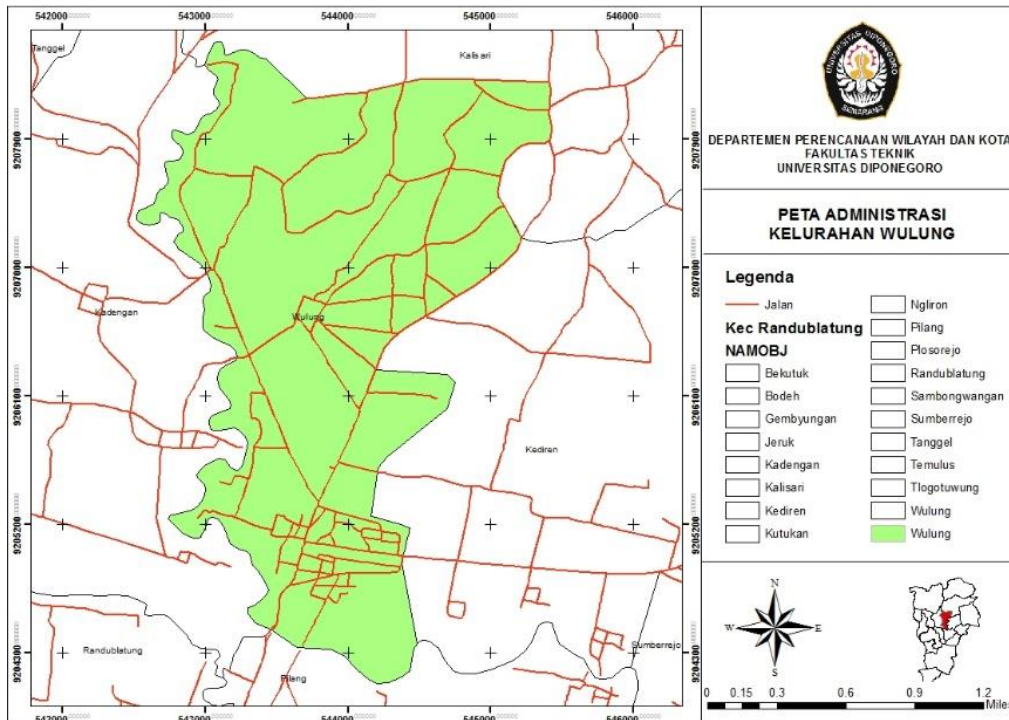
$$n = \frac{Z^2 \alpha p q}{d^2} = \frac{Z^2 p (1-p)}{d^2} \quad (1)$$

Dimana  $n$  jumlah sampel minimal yang digunakan;  $\alpha$  adalah derajat kepercayaan;  $p$  adalah proposi yang aman dan nyaman,  $q=1-p$  merupakan proporsi yang tidak nyaman; dan  $d$  adalah limit error atau presisi absolut. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan deskriptif komparatif. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi ketersediaan dan kondisi prasarana permukiman pada lokasi penelitian serta hasil kuesioner. Sedangkan analisis deskriptif komparatif digunakan untuk membandingkan kondisi eksisting dengan SNI dan persepsi masyarakat. Dengan menggunakan kedua analisis tersebut maka akan dapat dilakukan evaluasi ketersediaan prasarana permukiman di Kelurahan Wulung apakah sudah sesuai dan memenuhi standar atau belum dan bagaimana persepsi masyarakat terkait ketersediaan prasarana.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografis Kelurahan Wulung berada di pusat Kecamatan Randublatung dengan luas wilayah 860 Ha. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu wilayah perkotaan di Kecamatan Randublatung yang terdiri dari 6 RW dengan jumlah penduduk di Kelurahan Wulung sebanyak 7.507 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 3.698 jiwa (49,2%) dan penduduk perempuan 3.809 jiwa (50,8%). Kelurahan Wulung merupakan salah satu pusat kegiatan lokal di Kecamatan Randublatung yang ditandai dengan adanya Pasar Induk Wulung sebagai pusat perdagangan di Kecamatan Randublatung. Kelurahan Wulung terdiri dari 6 RW dengan didominasi penggunaan lahan pertanian dan permukiman.

**Gambar 1.** Peta Administrasi Kelurahan Wulung (Bappeda Kabupaten Blora, 2020)



**Kualitas Ketersediaan Prasarana Permukiman di Kelurahan Wulung Berdasarkan Standar**

Jaringan jalan sebagai prasarana perhubungan darat memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, perekonomian dan pembangunan. Mayoritas manusia melakukan aktivitas diluar rumah sehingga membutuhkan prasarana penunjang mobilitasnya. Adapun komparasi antara standar pelayanan jaringan jalan dan hasil observasi di Kelurahan Wulung dapat dilihat dalam tabel 2.

Secara umum jaringan drainase berfungsi sebagai saluran yang digunakan untuk mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air pada suatu tempat (Suripin, 2004). Selain itu juga berfungsi mengalirkan air agar tidak ada genangan di dalam kota (Silitonga, 2019). Ketersediaan jaringan drainase disertai dengan penyediaan bangunan pelengkapanya seperti gorong-gorong, jembatan maupun saluran lainnya. Adapun komparasi antara standar pelayanan jaringan drainase dan hasil observasi di Kelurahan Wulung dapat dilihat dalam tabel 3.

**Tabel 2.** Jaringan Drainase Berdasarkan Standar. (Analisis, 2022)

Jenis	Standar Ketentuan	Fakta di Lapangan	Kondisi
Drainase	Terdapat drainase/selokan Drainase mampu menampung air Jika ada genangan, tinggi genangan <30 cm, dengan lama genangan < 2 jam	Terdapat beberapa jenis drainase, diantaranya:  Drainase tertutup Drainase terbuka Drainase alami	Terdapat sumbatan rumput dan sampah pada beberapa drainase sehingga mengakibatkan saluran drainase mampet

**Tabel 3.** Jaringan Jalan Berdasarkan Standar. (Analisis, 2022)

Jenis	Standar Ketentuan	Fakta di Lapangan	Kondisi
Jalan Kolektor	L jalan ± 7 m L perkerasan 3–7 m L bahu jalan 1,5–2 m L pedestrian 1,5 m	L jalan 6–7 m L perkerasan 6–7 m L bahu jalan 0,5 m	Merupakan jalan utama dan jalan satu-satunya yang menghubungkan Kelurahan Wulung dengan pusat Kecamatan Randublatung maupun pusat Kabupaten Blora Kondisi jalan sangat bagus dengan perkerasan beton dan tidak berlubang Bahu jalan yang tersedia kurang lebar untuk standar jalan kolektor Minimnya penerangan jalan Tidak tersedia pedestrian
Jalan Lokal	L jalan ± 3-6 m L perkerasan 3–6 m L bahu jalan 1–1,5 m L pedestrian 1,5 m	L jalan 4-5 m Perkerasan aspal L perkerasan 4-5 m L bahu jalan 0,5 m	Merupakan jalan alternatif penghubung Kecamatan Randublatung dan Kecamatan Jati Sebagai jalan penghubung pusat kegiatan lokal di Kecamatan Randublatung Perkerasan jalan menggunakan aspal Kondisi jalan rusak berat dan berlubang di sepanjang Kelurahan Wulung Bahu jalan yang tersedia kurang lebar untuk standar jalan lokal Minimnya penerangan jalan Tidak tersedia pedestrian
Jalan Lingkungan	L jalan ± 3 m L perkerasan 3 m L bahu jalan 0,5 m L pedestrian 1,2 m	L jalan 3 m Perkerasan paving L perkerasan 3 m	Merupakan jalan lingkungan dalam permukiman Kelurahan Wulung Perkerasan jalan menggunakan paving, namun sebagian jalan masih terdapat perkerasan dengan menggunakan batu dan tanah Kondisi jalan cukup bagus, namun pada jalan dengan perkerasan batu dan tanah kurang bagus Tidak tersedia bahu jalan Minimnya penerangan jalan Tidak tersedia pedestrian

Jaringan persampahan tidak akan lepas dari sampah, pada dasarnya terdapat 2 macam pengelolaan sampah, yaitu pengelolaan/penanganan sampah setempat (individu) dan pengelolaan sampah terpusat untuk suatu lingkungan permukiman atau kota dengan adanya keterlibatan sumber penghasil sampah itu sendiri (Aulia, 2016). Adapun komparasi antara standar pelayanan jaringan persampahan dan hasil observasi di Kelurahan Wulung dapat dilihat dalam tabel 4.

**Tabel 4.** Jaringan Persampahan Berdasarkan Standar. (Analisis, 2022)

Jenis	Standar Ketentuan	Lingkup	Kebutuhan Berdasar Standar	Fakta di Lapangan	Kondisi
Jaringan Persampahan	Bak sampah dibuat dari bahan kedap bau, kedap air dan tidak mudah berkarat Dilengkapi gerobak sampah Dilengkapi tempat pengumpulan sementara yang terpisah dengan permukiman Dilengkapi truk sampah yang dapat menjangkau dan mengangkut sampah dari TPS menuju TPA	Rumah (5 jiwa)	Tong Sampah	Setiap rumah memiliki tempat sampah pribadi	Kondisi tempat sampah pribadi sangat bagus, namun mayoritas penduduk melakukan sistem persampahan lanjutan berupa pembakaran sampah dan pembuangan di pinggir sungai maupun di pinggir jalan
		RW (2.500 jiwa)	TPS	Tidak tersedia TPS tingkat RW	-
		Kelurahan (30.000)	TPS	Tersedia TPS tingkat kelurahan	Kondisi TPS berada di tempat terbuka dan berbau sehingga mengganggu aktivitas masyarakat, pengangkutan sampah tidak terkoordinir dengan baik

#### Kualitas Ketersediaan Prasarana Permukiman di Kelurahan Wulung Berdasarkan Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat terkait jaringan jalan di Kelurahan Wulung dapat dilihat pada tabel 5.

**Tabel 5.** Kualitas Jaringan Jalan Berdasarkan Persepsi Masyarakat. (Analisis, 2022)

Keterangan	Frekuensi (Jiwa)	Persentase (%)
Buruk	7	7
Cukup Baik	47	47
Baik	38	38
Sangat Baik	8	8
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Persepsi masyarakat terkait jaringan drainase di Kelurahan Wulung dapat dilihat pada tabel 6.

**Tabel 6.** Kualitas Jaringan Drainase Berdasarkan Persepsi Masyarakat. (Analisis, 2022)

Keterangan	Frekuensi (Jiwa)	Persentase (%)
Buruk	8	8
Cukup Baik	65	65
Baik	25	25
Sangat Baik	2	2
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Persepsi masyarakat terkait jaringan persampahan di Kelurahan Wulung dapat dilihat pada tabel 7.

**Tabel 7.** Kualitas Jaringan Persampahan Berdasarkan Persepsi Masyarakat. (Analisis, 2022)

Keterangan	Frekuensi (Jiwa)	Persentase (%)
Buruk	3	3
Cukup Baik	37	37
Baik	56	56
Sangat Baik	4	4
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Pembahasan

Berdasarkan standar nasional Indonesia (SNI) ketersediaan jaringan jalan di Kelurahan Wulung telah memenuhi standar pelayanan terkait dengan konstruksi jalan. Sedangkan berdasarkan persepsi masyarakat diketahui bahwa 38% masyarakat mengatakan bahwa jalan berkondisi baik, hal tersebut terlihat dari konstruksi jalan yang sudah di beton maupun paving. Namun, 47% masyarakat mengatakan kondisinya cukup baik karena mereka menganggap jalan lokal memiliki kualitas yang kurang bagus karena kondisi aspalnya rusak dan berlubang sehingga meningkatkan resiko kecelakaan dan mengurangi kenyamanan pengendara. Kondisi jalan dapat mempengaruhi intensitas pergerakan kendaraan yang melintasi lingkungan tersebut. Berikut adalah fakta di lapangan terkait dengan kondisi jalan di kawasan Kelurahan Wulung:

Ketersediaan jaringan jalan berdasarkan SNI telah memenuhi standar pelayanan yang berlaku. Apabila ditinjau dari persepsi masyarakat, sebagian masyarakat mengatakan jika kondisi jalan cukup baik dan sebagian lainnya mengatakan jika kondisi jalan sudah baik. Namun, jika dibandingkan dengan fakta di lapangan, masih ditemukan ruas jalan lokal dengan kondisi rusak dan berlubang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa ketidaksesuaian antara SNI, persepsi masyarakat dan fakta di lapangan dipengaruhi oleh karakteristik penggunaannya. Masyarakat yang menyatakan baik merupakan masyarakat dengan usia >60 tahun yang jarang melakukan mobilitas melewati jalan lokal dan masyarakat yang tempat tinggalnya berada diluar RW 04, RW 05 dan RW 06 karena aksesibilitas mereka tidak melewati jalan lokal di RW 04 dan RW 05.

Prasarana drainase yang tersedia di Kelurahan Wulung hampir merata, sebanyak 70% masyarakat mengatakan bahwa setiap rumah telah memiliki drainase dan 25% masyarakat mengatakan jika drainase yang tersedia masih jarang, sedangkan 5% masyarakat lainnya mengatakan jika drainase hanya tersedia dipinggir jalan raya. Ditinjau dari bangunan pelengkap, prasarana drainase yang tersedia telah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu tersedianya gorong-gorong, adanya pertemuan saluran dan jembatan. Namun dalam praktiknya, prasarana drainase yang tersedia tidak mampu menampung debit air sepenuhnya terlebih saat musim penghujan, kondisi saluran yang tersumbat sampah maupun rumput liar menghambat laju air dan menimbulkan banjir di RT/RW 01/01

yaitu di kawasan SMAN 1 Randublatung dan di RT/RW 02/02 kawasan Ledokan. Akan tetapi, masyarakat menganggap hal tersebut merupakan hal yang lumrah terjadi di musim penghujan karena intensitas terjadinya terbilang sering dan bagi masyarakat setempat bukanlah hal yang berdampak besar.

**Gambar 2.** Jalan Perkerasan Beton (Analisis, 2022)



**Gambar 3.** Jalan Perkerasan Paving (Analisis, 2022)



**Gambar 3.** Jalan Rusak (Analisis, 2022)



**Gambar 4.** Jalan Perkerasan Batu (Analisis, 2022)



**Gambar 5.** Drainase Mengalami Sedimentasi (Analisis, 2022)



**Gambar 6.** Drainase Tersumbat Rumput dan Sampah (Analisis, 2022)



Ketersediaan jaringan drainase berdasarkan SNI telah memenuhi standar pelayanan dan ketentuan yang berlaku. Apabila ditinjau dari persepsi masyarakat, sebanyak 65% sepakat bahwa jaringan drainase yang tersedia juga cukup baik dan cukup memadai. Namun, fakta dilapangan menunjukkan jika sebagian jaringan drainase tidak mampu menampung debit air saat musim penghujan khususnya pada RW 01 dan RW 02. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penyebab ketidaksesuaian antara SNI, persepsi masyarakat dan kondisi eksisting adalah lokasi tempat tinggal dan dimensi jaringan drainase yang kurang lebar serta tersumbat rumput liar dan sampah. Ketika musim hujan datang dan jaringan drainase tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya mengakibatkan adanya



luapan air di beberapa kawasan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketersediaan jaringan drainase di Kelurahan Wulung belum sepenuhnya memadai.

Prasarana persampahan yang tersedia di Kelurahan Wulung terdiri dari dua tingkatan yaitu tingkat rumah tangga dan tingkat lingkungan. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) penyediaan persampahan di lingkungan rumah tangga meliputi penyediaan tong sampah dan dalam praktiknya di lapangan setiap rumah telah menyediakan tempat sampah dalam kondisi baik. Kemudian dalam lingkungan telah tersedia tempat pembuangan sementara (TPS) yang terletak di RT 04 RW 01 dan dilengkapi dengan bak sampah. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) penyediaan TPS telah sesuai jika ditinjau dari dimensinya, TPS di Kelurahan Wulung memiliki luas 20 m<sup>2</sup>. Jika ditinjau dari lokasinya, TPS telah sesuai dengan SNI yaitu berjarak minimum 30 meter dari lingkungan hunian, akan tetapi penyediaan TPS tidak dibarengi dengan adanya pengangkutan sampah sehingga membuat masyarakat memilih untuk membakar sampah rumah tangganya. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan bahwa 30% masyarakat mengatakan jika TPS sulit dijangkau dan 29% masyarakat lainnya mengatakan jika TPS cukup mudah dijangkau.

**Gambar 7.** TPS di Kelurahan Wulung  
(Analisis, 2022)



**Gambar 8.** Tumpukan Sampah di Pinggir Jalan  
(Analisis, 2022)



Ketersediaan jaringan persampahan di Kelurahan Wulung jika ditinjau berdasarkan SNI telah memenuhi standar terkait dengan jumlah pelayanannya. Apabila ditinjau dari persepsi masyarakat kondisi TPS yang tersedia tergolong baik. Namun, fakta di lapangan menyebutkan bahwa TPS di Kelurahan Wulung belum berfungsi sebagaimana mestinya. Hal tersebut diperkuat dengan adanya tumpukan sampah di pinggir jalan dan pinggir sungai. Berdasarkan hasil penelitian, penyebab masih ditemukannya tumpukan sampah tidak pada tempatnya dikarenakan masyarakatnya lebih memilih cara praktis daripada sesuai dengan aturan. Ketidaksihinggaan antara SNI, persepsi masyarakat dan fakta di lapangan dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat yang kurang peduli terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan dipengaruhi oleh radius pencapaian masyarakat untuk menjangkau TPS tersebut. Dengan demikian penyediaan jaringan persampahan belum memenuhi standar pelayanan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis evaluasi ketersediaan prasarana permukiman di Kelurahan Wulung, secara umum ketersediaan prasarana di Kelurahan Wulung seperti jaringan jalan, jaringan drainase dan jaringan persampahan telah tersedia sesuai dengan kebutuhan masyarakat jika ditinjau berdasarkan standar nasional Indonesia (SNI). Ketersediaan jaringan jalan tidak diimbangi dengan penyediaan prasarana pelengkap jalan seperti lampu penerangan jalan dan rambu-rambu lalu lintas. Mengingat di Kelurahan Wulung masih banyak tersedia lahan pertanian yang menghubungkan kawasan permukiman masyarakatnya sehingga penerangan sangat minim terlebih saat musim penghujan akan membahayakan pengendara yang melintasi Kelurahan Wulung terlebih di RW 04 dan RW 05 yang kondisi jalannya rusak, berlubang dan licin. Ketersediaan tempat pembuangan sementara

(TPS) tidak dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat di Kelurahan Wulung yang terkendala jarak tempuh. Dalam penyediaannya pun tidak dilengkapi dengan sistem persampahan yang optimal karena tidak adanya truk pengangkut sampah yang bertugas untuk membuang sampah rumah tangga menuju tempat pembuangan sementara (TPS).

## 5. REFERENSI

- Adimagistra, T., & Pigawati, B. (2016). Evaluasi Penyediaan Sarana Dan Prasarana Di Perumahan Puri Dinar Mas Semarang. *Jurnal Pengembangan Kota*, 4(1), 58. <https://doi.org/10.14710/jpk.4.1.58-66>
- Anggraini, S. (2014). Kajian Infrastruktur Persampahan di Kawasan Permukiman Masyarakat dengan Pendapatan Rendah Kecamatan Kertapati Kota Palembang. *Jurnal Teknik Sipil Dan Lingkungan*, 2, 161–165.
- Aulia, E. (2016). *Pengelolaan sampah dengan prinsip 3R OK*.
- Puspita, D., & Suwandono, D. (2014). Evaluasi Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Permukiman Di Kelurahan Bandarjo Kabupaten Semarang. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 3(4), 738–747.
- Setiadi, A. (2015). *Studi Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas pada Kawasan Permukiman Perkotaan di Yogyakarta*. 3(April), 27–38.
- Silitonga, B. (2019). Identifikasi Sistem Drainase Untuk Penanganan Banjir Kota Medan. *Jurnal Rekayasa Konstruksi Mekanika Sipil (JRKMS)*, 2(1), 35–42. <https://doi.org/10.54367/jrkms.v2i1.434>
- Sinulingga, B. (1999). Pembangunan Kota: Tinjauan Regional dan Lokal. *Pembangunan Kota*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Setiyawami (ed.); Cetakan ke). Penerbit Alfabeta.
- Suripin. (2004). *Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan*. Andi Offset.
- Tahir, M. A. (2019). Identifikasi Ketersediaan Sarana dan Prasarana Permukiman Pada Perumahan Sederhana di Perkotaan (Studi Kasus: Perumahan Perumnas Poasia Kota Kendari). *Jurnal Malige Arsitektur*, 1(1), 9–18.